

# HUKUM SUDARSO DAN FRANK WIJAYA PENJARA 5 TAHUN SERTA DENDA RP 250 JUTA



## Hukum Sudarso Dan Frank Wijaya Penjara 5 Tahun serta Denda Rp 250 Juta

### Profil Terdakwa

- Nama lengkap : Sudarso  
Tempat : Kisaran, Kabupaten Asahan  
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/27 Juli 1965  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Kartama Gg Nurmalis No 2 RT 002 RW 021 Kel. Maharatu  
Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru  
Pekerjaan : General Manager PT Adimulia Agrolestari  
Pendidikan terakhir : SMA
- Nama lengkap : Frank Wijaya  
Tempat : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/23 Januari 1974  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Buddha  
Alamat tempat tinggal : Jl. Juandha II/28 K, Medan, Sumatera Utara  
Pekerjaan : Komisaris/Swasta/Pemegang Saham PT Adimulia Agrolestari  
Pendidikan terakhir : S1

### Majelis Hakim

1. Yuli Artha Pujayatoma (ketua)
2. Iwan Irawan (anggota)
3. Adrian Hasiholan Bogawijn Hutagalung (anggota)

### Penuntut Umum

1. Wahyu Dwi Oktafianto
2. Rio Frandy
3. Yoga Pratomo
4. Riniyati Karnasih
5. Wawan Yunarwanto
6. Ariawan Agustiarsono
7. Amir Nurdianto
8. Heradian Salipi
9. Nur Haris Arhadi
10. Arif Rahman Irsady
11. Dwi Eko Raharjo
12. Sandi Septi Murhanta
13. N.N Gina Saraswati

## Penasihat Hukum

1. Refman Basri
2. Chairul Fahu Siregar
3. Rahmat

## Dakwaan Sudarso

### Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa SUDARSO bersama FRANK WIJAYA merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pasal 5 ayat (1) huruf a: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

### Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa SUDARSO bersama FRANK WIJAYA merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

## Dakwaan Frank Wijaya

### Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa SUDARSO bersama FRANK WIJAYA merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pasal 5 ayat (1) huruf a: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Pasal 65 Ayat (1) KUHP:

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

### Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa SUDARSO bersama FRANK WIJAYA merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 65 Ayat (1) KUHP:

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

## Tabel Kesaksian

No	Nama	Keterangan	Link Publikasi
1	<b>Tarbarita Simorangkir</b> Kepala Bidang Pengendalian, Pemberdayaan dan penyelesaian Sengketa BPN Riau	PT AA mengajukan perpanjangan Hak guna Usaha (HGU) untuk Kebun Singingi Hilir seluas 1.215 ha, Logas Tanah Darat 2.152 ha dan Gunung Sahilan 1.835 ha.  Saat ekspos ia tahu syarat pembangunan plasma 20 persen belum ada. Tapi pembahasan tetap lanjut dengan alasan ikut perintah Syahrir Kepala BPN Riau saat itu, dan hanya perlu lengkapi surat rekomendasi Bupati Kuansing.	<a href="https://senarai.or.id/korupsi/pulang-ekspos-perusahaan-beri-uang-saku/">https://senarai.or.id/korupsi/pulang-ekspos-perusahaan-beri-uang-saku/</a>  <a href="https://youtu.be/2SEOdS6m01Y">https://youtu.be/2SEOdS6m01Y</a>
2	<b>Syafri</b> Kepala Bidang Hubungan Hukum BPN Riau	Pernah didatangi Sudarso dikantor membahas soal pemecahan sertifikat HGU pasca keluarnya Permendagri 118/2019 tentang perubahan batas wilayah Kuansing dan Kampar. Ada juga pembicaraan tentang plasma yang belum dibangun padahal umur HGU mau kadaluarsa.	
3	<b>Usman Raya</b> Kepala Seksi bidang land Reform dan Konsolidasi BPN Riau	Ikut ekspos menggantikan atasannya yang sakit. Dalam pertemuan itu hanya ingat bahwa perusahaan belum punya plasma di Kuansing.	
4	<b>Ibrahim Dasuki</b> Kepala Seksi Penetapan hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kuansing	Kantornya pernah didatangi Zulfahmi Legal PT AA untuk memasukkan permohonan perpanjangan HGU PT AA. Pengantar untuk ke BPN Riau dibuat, meskipun plasma belum ada. Katanya itu irusan Panitia B. Sempat dengar keluhan dari desa Suka maju bahwa 164 ha lahan desa tumpang tindih dengan HGU	

		PT AA.	
5	<b>Sunyeto</b> Kepala Desa Bumi Mulya	Kalau PT AA mau diperpanjang HGU harus dahulu bangun plasma.	
6	<b>Abdul Rohmat</b> Badan Permusyawaratan Desa Beringin Jaya	Desa-nya sudah sepakat menolak perpanjangan HGU PT AA karena tidak berikan manfaat buat masyarakat.	
7	<b>Risman Ali</b> Camat Singingi Hilir	Ia mendukung perpanjangan HGU meskipun banyak penolakan dari desa dan belum dibangun plasma.	
8	<b>Sutrilwan</b> Kepala Bagian Tata Usaha BPN Riau	<p>Sewaktu ia jabat Kepala Kantor Pertanahan Kampar, ia didatangi Sudarso untuk urus Surat Keterangan Pengantar Tanah. Ternyata setelah dicek disistem pertanahan, wilayah PT AA berada di Kabupaten Kuansing dan Kampar.</p> <p>Ia bantu untuk pemecahan HGU Kampar, sertifikat di pisah menjadi dua di Kabupaten Kampar tetap satu persil yakni HGU No 08 dengan luasan 2.716 hektar. Di Kuansing menjadi tiga persil HGU No 09, 10, 11 dengan luasan 1.236 hektar. Dan dapat Rp 60 juta dari Sudarso 'uang terima kasih' dipakai untuk renovasi kantor.</p>	<p><a href="https://senarai.or.id/korupsi/syarat-belum-lengkap-permohonan-tetap-diproses/">https://senarai.or.id/korupsi/syarat-belum-lengkap-permohonan-tetap-diproses/</a></p> <p><a href="https://youtu.be/GrDZngXSrU">https://youtu.be/GrDZngXSrU</a></p>
9	<b>Umar Fathoni</b> Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Riau	<p>Ia terima disposisi dari Syahrir Kepala Kantor Wilayah BPN Riau, hanya saja permohonan perpanjangan HGU tanpa surat pengantar dari Kantah Kuansing. Setelah dilakukan penelitian awal ternyata belum punya plasma dan penetapan calon petani.</p> <p>Sewaktu ekspos tidak sampaikan kekurangan tadi</p>	

10	<b>Sidiq Aulia</b> Analis Hukum BPN Riau	Syarat dokumen perpanjangan HGU PT AA masih belum lengkap dan plasma juga belum terbangun. Ia ingat Syahrir sebut untuk menutupi kekurangan tersebut hanya perlu Surat rekomendasi dari Bupati Kuansing tentang penempatan plasma Kebun Kuansing di Kampar	
11	<b>Hermen</b> Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Riau	Ia mendengar dari Syahrir untuk perpanjangan HGU PT AA hanya perlu rekomendasi dari Bupati Kuansing	
12	<b>Mardansyah</b> Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kuansing	18 Oktober 2021 ia dapat disposisi tentang permintaan PT AA tentang rekomendasi penempatan kebun plasma. Ia tidak paham dengan permintaan itu dan mengembalikan surat ke ruangan bupati lagi.	
13	<b>Andri Meriki</b> Staff Bagian Umum Ruangannya Bupati Kuansing	Ia yang menerima undangan ekspos PT AA tertuju ke Bupati Kuansing, lalu mendelegasikan ke Agus Mandar Sekda dan Irwan Najib Kepala Bagian Ekonomi untuk hadir.	
14	<b>Desi Ekawati</b> Analis Hukum BPN Riau	Ia bersama Yeni Veranika saat ekspos bertugas menyusun bangku undangan dan pemberian mic ke peserta ekspos.	
15	<b>Yeni Veranika</b> Analis Hukum BPN Riau	Ia yang bertugas memverifikasi kelengkapan syarat perpanjangan HGU PT AA, ternyata surat pengantar dari Kantah Kuansing dan Kampar tidak ada. Namum karena sudah dapat disposisi Syahrir berkas tetap dilanjutkan.  Ia juga yang bertugas membuat notulensi saat rapat eksposnya.	<a href="https://senarai.or.id/korupsi/bagi-bagi-uang-untuk-pegawai-kanwil-bpn-riau/">https://senarai.or.id/korupsi/bagi-bagi-uang-untuk-pegawai-kanwil-bpn-riau/</a>  <a href="https://youtu.be/uZTTDNszlHo">https://youtu.be/uZTTDNszlHo</a>

16	<b>Indri Kartika Dewi</b> Kepala Seksi Pendaftaran Hak Tanah BPN Riau	Ia diperintah Umar untuk bantu pemesanan hotel untuk dan kebutuhan teknis lainnya terkait pelaksanaan ekspos.	
17	<b>Rizal Arif</b> Honorer Administrasi Umum BPN Riau	Ia hanya bantu serahkan mic saat ekspos bersama dengan Desi Ekawati.	
18	<b>Masrul</b> Kepala Seksi Pemeliharaan Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Riau	Saat ekspos ingat bahwa Syahrir bilang hanya perlu surat rekomendasi Bupati Kuansing untuk menutupi syarat plasma yang belum terbangun.	
19	<b>Rudi Ngadiman</b> Staff Teknik dan Produksi Pabrik PT AA	Rudi jadi kuasa pencairan cek PT AA Kantor Pekanbaru. Untuk biaya perpanjangan HGU ia menandatangani pencairan sebanyak Rp 1, 086 Miliar. Lalu membawa uang sebanyak 150.000 SGD untuk Syahrir lewat Sudarso	<a href="https://senarai.or.id/korupsi/penuntut-umum-masih-hadirkan-saksi-terkait-ekspos/">https://senarai.or.id/korupsi/penuntut-umum-masih-hadirkan-saksi-terkait-ekspos/</a>  <a href="https://youtu.be/8K4EXozk7ro">https://youtu.be/8K4EXozk7ro</a>
20	<b>Syahlevi Andra</b> Kepala Kantor PT AA untuk Pekanbaru	Semua uang yang dicairkan Rudi Ngadiman, Syahlevi yang pegang. Selanjutnya diserahkan ke Sudarso. Ia tahu bahwa Sudarso yang diperintahkan atasannya untuk mengurus perpanjangan HGU perusahaan.	
21	<b>Paino</b> Senior Manager PT AA	Ia turut bagikan uang untuk peserta ekspos perpanjangan HGU PT AA. Dan bersama Sudarso ke rumah dinas Andi Putra 18 Oktober 2021 sebelum di tangkap tangan oleh KPK, untuk mengecek perkembangan surat rekomendasi yang diminta PT AA	
22	<b>David Vence Turangan</b> Direktur Utama PT AA	Sebelum Hadi Ngadiman Komisaris PT AA wafat, seluruh urusan perpanjangan HGU PT AA dilimpahkan ke Sudarso. Ia hanya bertugas memenuhi kelengkapan administrasi yang diminta Sudarso. Juga	



		menandatangani permintaan rekomendasi ke Andi Putra Bupati Kuansing.	
23	<b>Riana Iskandar</b> Direktur Pembukuan PT AA	Perusahaan sudah menyiapkan biaya pengurusan perpanjangan HGU sejak 2017. Permintaan Sudarso Rp 286 juta dan Rp 300 juta dicatat permintaan Sudarso untuk perpanjangan HGU. Sedangkan Rp 500 juta disebut pinjaman bupati. Semua uang keluar sebab telah disetujui Frank Wijaya.	
24	<b>Yuhartati Zainudin</b> Kasir PT AA	Yuhartati Zainudin selaku Kasir yang bertugas tuliskan besaran pencairan diatas cek. Hadi tinggal tanda tangan saja.	
25	<b>Dwi Handaka</b> Kepala Bidang Survei dan pemetaan BPN Riau	Ia dibiayai oleh Sudarso untuk konsultasi terkait pemecahan sertifikat HGU PT AA pasca terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2019. Uang diserahkan dibandara sebanyak Rp 50 Juta. Pun sewaktu jabat Plt Kepala Kantah Kuansing, ia tidak mengeluarkan surat pengantar untuk PT AA, malah langsung mengirim ke BPN Riau. Ia juga tahu bahwa perusahaan belum punya plasma, namun semua berkas tetap diproses.	<a href="https://senarai.or.id/korupsi/saksi-banyak-pegawai-kanwil-terima-uang-dari-pt-adimulia-agrolestari/">https://senarai.or.id/korupsi/saksi-banyak-pegawai-kanwil-terima-uang-dari-pt-adimulia-agrolestari/</a>  <a href="https://youtu.be/CrPThuWqnnA">https://youtu.be/CrPThuWqnnA</a>
26	<b>Deni Winata Hariyanto</b> Pegawai Bidang Pengendali Ekosistem Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru	Ia hanya menerangkan bahwa lahan PT AA masuk Areal Penggunaan Lain.	
27	<b>Deli Iswanto</b> Supir Andi Putra	Ia diperintahkan Andi Putra untuk ambil uang dari Sudarso di Jalan Kartama Pekanbaru. Lalu disuruh titip uang tadi di rumah Andri.	

28	<b>Andri</b> Penjaga Kebun Andi Putra	Ia terima titipan uang dari Deli dalam kantong plastik hitam.	
29	<b>Hendri Kurniadi</b> Ajudan Andi Putra	Ia yang mendampingi Andi Putra saat pengejaran oleh tim KPK. Dan semua komunikasi Andi ke keluarga dan pengacara melalui selularnya.	
30	<b>Sri Ambar Kusumawati</b> Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Riau	Saat ekspos juga disampaikan agar perpanjangan plasma PT AA itu perlu diteliti kembali karena sudah lama beroperasi dan menghindari terjadinya konflik di masyarakat.	<a href="https://senarai.or.id/korupsi/risna-bawa-sudarso-jumpa-syahrir/">https://senarai.or.id/korupsi/risna-bawa-sudarso-jumpa-syahrir/</a>  <a href="https://youtu.be/oDqgUnhC_s">https://youtu.be/oDqgUnhC_s</a>
31	<b>Risna Virgianti</b> Kepala Kantor Pertanahan Kuansing	Awal 2020 ia yang bawa Sudarso untuk bisa jumpa dengan Syahrir. Ia tahu Sudarso sedang urus perpanjangan HGU PT AA.	
32	<b>Eri Kuswondo</b> Kepala Kantah Kuansing 2009-2013	Ia dan Sudarso kenal sejak urusan pelepasan HGU PT Surya Agro Reksa. Di 2021 ia dihubungi Sudarso menanyakan soal kabar Syahrir yang akan dimutasi. Sudarso juga ada sebut bagaimana dengan kejelasan permintaan 60% dari Syahrir sementara di hendak dimutasikan.	
33	<b>Teguh Syhputra</b> Ajudan Syahrir	Ia pernah dihubungi Risna dan Sudarso perihal ingin jumpa Syahrir. Ia juga pernah melihat ketiganya berjumpa di rumah dinas Syahrir.	
34	<b>Fredy Hutauruk dan Jhony Islam Roy</b> Satpam Rumah Dinas Syahrir	Mereka melihat Sudarso masuk rumah dinas Syahrir, pertemuannya hanya sekitar 15 menit. Pertemuan pertama dengan Risna selanjutnya hanya Sudarso sendiri	
35	<b>Fahmi Zulfadli</b> Legal PT AA	Ia yang memasukkan permohonan perpanjangan HGU PT AA ke Kantah Kuansing serta yang mengetik surat permintaan rekomendasi ke Bupati Kuansing. Saat	

		ekspos ia juga yang membagikan uang ke peserta yang hadir	
36	<b>Ahmad Saleh Mandar</b> Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Riau	2018 masukkan permohonan pengukuran bidang PT AA, yang sewaktu itu masih berada di Kampar.	
37	<b>Syahrir</b> Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Riau	<p>Ide permintaan rekomendasi penempatan kebun ke Andi Putra, hasil pemikirannya padahal itu tidak ada dasar hukumnya. Ia juga tidak mengaku terima uang sebanyak 112.000 SGD atau sekitar Rp 1,2 Miliar dari kesepakatan Rp 3,5 Miliar.</p> <p>Namun saat Andi dan Sudarso kena tangkap tangan Komisi Pemberantas Korupsi ia buru buru ambil semua uang dalam rekening bank dan berusaha menutup pemberitaan dengan membayar wartawan, mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat.</p>	<p><a href="https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-masih-menyangkal-terima-uang-dari-pt-aa/">https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-masih-menyangkal-terima-uang-dari-pt-aa/</a></p> <p><a href="https://youtu.be/jcTS7DCrOeo">https://youtu.be/jcTS7DCrOeo</a></p>
38	<b>Andi Putra</b> Bupati Kuansing	Ia tetap bertahan bahwa uang yang didapat dari Sudarso merupakan pinjaman, serta sudah merasa dekat dengan Sudarso.	
39	<b>Sudarso</b> Terdakwa	Semua permintaan uang untuk perpanjangan HGU PT AA yang diberi untuk pegawai BPN Riau dan Kuansing, Syahrir dan Andi Putra atas persetujuan Frank Wijaya. PT AA memang sudah banyak keluar uang selama perpanjangan HG, semua uang dikeluarkan berharap HGU segera diperpanjang.	<p><a href="https://senarai.or.id/korupsi/sudarso-syahrir-minta-rp-35-miliar/">https://senarai.or.id/korupsi/sudarso-syahrir-minta-rp-35-miliar/</a></p> <p><a href="https://youtu.be/SrKWp2_-EsM">https://youtu.be/SrKWp2_-EsM</a></p>
40	<b>Frank Wijaya</b> Terdakwa	Ia masih bertahan bahwa uang untuk Andi Putra merupakan pinjaman dan uang untuk Syahrir merupakan titipan dari	

Alm Hadi Ngadiman.

Jumlah Sidang : 9 kali

Jumlah saksi : 39 orang

### Temuan dan Analisis:

1. **Terkait suap perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari**
  - **Suap mempermudah izin untuk Syahrir**

Sejak awal, Sudarso dan Frank Wijaya sudah mengetahui bahwa tidak adanya plasma PT AA di Kuansing. Ini akan menghambat proses perpanjangan HGU. Buktinya Zulfahmi Legal perusahaan saat memasukkan permohonan sudah diberitahu Ibrahim Dasuki Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Kuansing bahwa plasma PT AA belum ada, hanya saja berkas tetap di proses.

Maka Sudarso minta dihubungkan Risna Virgianti Kepala Kantah Kuansing untuk bisa diketemu Syahrir. Syahrir setuju, jadilah pertemuan pertama 3 Agustus 2021. Sudarso minta tolong supaya dibantu pengurusan izin perpanjangan HGU. Syahrir setuju lalu meminta Rp 3,5 miliar berbentuk Dollar Singapura dengan pembayaran dimuka 40 hingga 60 persen.

Pertemuan kedua, di rumah dinas Jl. Kartini Sudarso bilang Frank Wijaya sudah setuju. Pertemuan ketiga, Sudarso datang lagi, bahas uang sudah ada dan bagaimana cara pemberian uang. Syahrir minta ia datang kembali sehari sebelum ekspos dan tanpa bawa alat komunikasi.

Kedatangan Sudarso yang keempat kalinya, membawa uang sebanyak 112.000 SGD. Sebelum jumpa Syahrir, ia disuruh menunggu di teras oleh Satpam Fredy Hutauruk karena Syahrir sedang sholat Isya. Tidak berapa lama Sudarso diajak Syahrir masuk ke ruang tamu dan uang diserahkan.

Keesokan harinya, 3 September 2021 saat rapat ekspos di Hotel Prime Park, Kepala Desa Beringin Jaya dan Bumi Mulya minta kalau HGU PT AA ingin diperpanjang harus membangun plasma dahulu. Peserta rapat yang terdiri dari; Pegawai Kanwil dan Kantah serta Pegawai Dinas dan Pemda sudah mengetahui PT AA tidak memiliki plasma di Kuansing. Tetapi mereka tidak bisa membantah sebab sepanjang rapat, Syahrir berulang kali sebut perusahaan hanya perlu meminta rekomendasi persetujuan penempatan plasma PT AA di Kampar dari Bupati Kuansing.

Pelaksanaan ekspos di Hotel Prime Park, Syahrir mengakui itu tidak ada dasar aturannya hanya semata-mata kekuasaannya sebagai kepala Kanwil BPN Riau.

- **Suap permintaan rekomendasi Andi Putra**

Sudarso langsung gerak cepat untuk mengurus surat rekomendasi persetujuan penempatan kebun plasma ke Andi Putra Bupati Kuansing non aktif. Setelah komunikasi melalui *handphone*, Andi Putra datang menemui Sudarso di rumah pribadinya Andi Putra minta uang Rp 1,5 miliar, Sudarso menghubungi Frank bicarakan terkait permintaan Andi Putra dan Frank setuju.

Tahap pertama Rp 500 juta uang dijemput Deli Iswanto Supir Andi di rumah Sudarso. Setelahnya, permohonan permintaan rekomendasi diantar ke rumah dinas Andi Putra oleh Sudarso saat HUT Kab. Kuansing. Setelah itu, Andi Putra menelpon serta menagih janji penyerahan tahap selanjutnya, tapi Frank setuju diberikan Rp 250 juta dulu. Dengan keyakinan surat rekomendasi keluar karena sudah menyerahkan uang.

Saat uang tahap dua ingin diserahkan, Sudarso pergi menemui Andi untuk menanyakan kepastian surat rekomendasi yang diminta tanpa membawa uang. Sampai akhirnya, ia terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Andi Putra melarikan diri dengan memutar haluan hingga ke Bangkinang saat perjalanan menuju Pekanbaru. Dan memblokir seluruh perangkat selulernya.

Andi Putra sudah terbiasa meminta uang kepada PT AA lewat Sudarso sebelum menjabat sebagai Bupati Kuansing. Biaya kampanye calon bupati Rp 200 juta dan biaya operasional saat menjabat Ketua DPRD Kuansing Rp 70 juta.

- **Suap sebelum dan sesudah permohonan perpanjangan HGU**

Sebelum	Sesudah
<b>Pemetaan ulang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dwi Handaka Rp 50 juta</li> <li>- R. Ahmad Saleh Mandar Rp 25 juta sisanya Rp 50 juta lagi ke tim pengukur</li> </ul>	<b>Saat Ekspos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarbarita Simorangkir Rp 10 juta</li> <li>- Usman Raya Rp 10 juta</li> <li>- Ibrahim Dasuki Rp 3 juta</li> <li>- Ruskandi Rp 2,5 juta</li> <li>- Sunyeto Rp 2,5 juta</li> <li>- Abdul Rohmat Rp 3 juta</li> <li>- Risman Rp 5 juta</li> <li>- Umar Fathoni Rp 15 juta</li> <li>- Siddiq Aulia Rp 7 juta</li> <li>- Desi Ekawati Rp 2 juta</li> <li>- Yeni Veranika Rp 7 juta</li> <li>- Indri Kartika Rp 8 juta</li> <li>- Rizal Rp 2 juta</li> <li>- Masrul Rp 3 juta</li> <li>- Denny Winata Rp 3 juta</li> <li>- Sri Ambar Kusumawati Rp 3 juta</li> <li>- Teguh Syahputra Rp 4 juta</li> <li>- Dwi Handaka Rp 20 juta</li> </ul>
<b>Pemecahaan Sertifikat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risna Virgianti Rp 7 juta</li> <li>- Sutrilwan Rp 75 juta</li> </ul>	

Bahwa sebelum dan sesudah permohonan perpanjangan HGU, PT AA sudah berusaha menyuap pegawai agar dimudahkan dalam proses permohonan meskipun tanpa syarat plasma 20%.

## 2. Temuan lainnya

### • Pencucian Uang oleh Syahrir

Saat pemeriksaan Syahrir sebagai saksi, ia mengaku sering menerima uang dari perusahaan yang berurusan dengan Kanwil ATR/BPN Riau. Modus pemberian uang menggunakan parcel tertuju ke rumah dinas. Uang terkumpul sebanyak Rp 2,9 miliar lalu uang disebar ke orang terdekat; Hipsong Adik Ipar, Yudi dan Rendi Keponakan, Mila Pengawai Kontrak, Okta Asisten Rumah Tangga.

Selanjutnya mereka disuruh menyetor ke rekening Syahrir. Dan Sebagian uang dipakai untuk membeli mobil Ford milik Teguh Syahputra Ajudan Syahrir, dengan alasan membantu Teguh. Pun saat Andi Putra tertangkap KPK, ia segera menarik seluruh uang di rekening untuk disebar ke Lembaga Swadaya Masyarakat, Wartawan dan mahasiswa untuk menutupi pemberitaan kasus Andi Putra.

### • Kementerian ATR/BPN sumber korupsi

Langkah cepat Sri Mulyani Menteri Keuangan untuk menginvestigasi harta kekayaan pegawai pajak yang tidak wajar dan mengusulkan pemecatan para pegawainya, layak dicontoh oleh Hadi Tjahjanto Menteri ATR/BPN untuk memberantas kepala dan pegawai pertanahan yang suka menerima uang dalam urusan pertanahan. Contohnya Syahrir yang mengaku sering menerima uang dari perusahaan dan pegawainya juga melakukan hal yang serupa.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Terdakwa Sudarso dan Frank Wijaya melanggar dakwaan alternatif pertama

### Rekomendasi

Senarai mendesak supaya:

1. Hakim menghukum Sudarso dan Frank Wijaya dengan penjara 5 tahun denda Rp 250 juta
2. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi segera melimpahkan berkas Syahrir ke persidangan dan mendakwa dengan Pasal Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Hadi Tjahjanto mencabut Hak Guna usaha PT Adimulia Agrolestari sebab telah percontohan terjadinya korupsi dilingkungan badan pertanahan. Sekaligus mengevaluasi besar-besaran kinerja para pegawai pertanahan di Riau.